

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi merupakan wadah perkumpulan individu atau kelompok yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah organisasi terdapat individu yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Secara umum pengetahuan dibagi menjadi dua yaitu pengetahuan tacit merupakan pengetahuan yang tersimpan dalam pikiran individu (pegawai) dan pengetahuan eksplisit merupakan pengetahuan tacit yang telah terdokumentasikan. Berdasarkan *Riset Delphi Group* menunjukkan bahwa pengetahuan dalam organisasi terdiri dari 42% tersimpan dalam pikiran (pegawai), 26% dokumen kertas, 20% dokumen elektronik, 12% *knowledge base* elektronik (Setiarso,2012, p, 8).

Melalui *Riset Delphi Group* tersebut, dijelaskan bahwa individu memiliki pengetahuan yang masih asli tercatat dalam pikiran (pengetahuan sembunyi) belum terdokumentasi dan sebagai aset berharga pada diri individu. Pengetahuan tacit berisi tentang pengetahuan individu dari pengalaman sehari-hari. Pengetahuan tacit pegawai adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesuksesan dalam organisasi (Chindambaranathan dan Swarooprani, 2015). Dengan demikian, pengetahuan tacit pegawai merupakan komponen penting pada diri individu untuk keberlangsungan kinerja dalam organisasi. Pengetahuan dan

kemampuan yang dimiliki seorang pegawai dalam organisasi perlu dirancanag dan dikelola secara terstruktur untuk menghindari hilangnya pengetahuan. Hal ini dibantu adanya penerapan manajemen pengetahuan yang mengambil dari aspek pengetahuan untuk mempelajari proses hilangnya pengetahuan tacit dan kemampuan mentransfer pengetahuan (Daghfous,dkk,2013, p, 2-3). Pegawai yang memiliki pengetahuan tacit harus melakukan proses transfer pengetahuan secara mendalam kepada anggota lainnya. Proses transfer pengetahuan secara efektif melalui percakapan dari individu ke individu lainnya. Adapun pengetahuan eksplisit lebih mudah dalam mendapatkan atau menyerap pengetahuan melalui sesuatu yang sudah terdokumentasikan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah untuk menjaga aset pengetahuan di dalam organisasi yang sering disebut *knowledge preservation* atau pelestarian pengetahuan. Menurut Probst dalam (Hendrawan, 2013, p, 4) istilah *knowledge preservation* merupakan proses dimana retensi selektif akan informasi, dokumen dan pengalaman yang diperlukan oleh sebuah manajemen sedang berlangsung.

Salah satu organisasi atau perusahaan yang sudah memiliki kesadaran melakukan penerapan preservasi pengetahuan adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional atau disingkat BATAN. BATAN merupakan organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang nuklir. Permasalahan yang terjadi disebabkan adanya anggota yang memiliki keahlian di bidang nuklir akan keluar meninggalkan organisasi karena pensiun. Hal ini menimbulkan BATAN akan kehilangan aset pengetahuan di bidang nuklir (Wijaya dan Rhisa,2015, p,

65–72). Pada akhirnya BATAN berupaya melakukan preservasi pengetahuan dalam jangka waktu cukup lama.

Berdasarkan uraian tersebut, pengetahuan dapat hilang disebabkan karena pengetahuan masih bersifat individual, individu yang memiliki pengetahuan tacit keluar meninggalkan organisasi, dan organisasi mengalami kesulitan dalam menyimpan pengetahuan. Oleh karena itu, organisasi harus melakukan upaya untuk memelihara dan melestarikan pengetahuan. Salah satu upaya untuk melestarikan pengetahuan yaitu preservasi pengetahuan. Kegiatan preservasi pengetahuan perlu dilaksanakan sehingga dapat dimanfaatkan untuk waktu mendatang guna kepentingan kemajuan dan perkembangan organisasi. Selain itu, dapat menanggulangi terjadinya *organizational memory loss* disebabkan karena anggota inti keluar meninggalkan organisasi karena purna atau meninggal dunia.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya akan ditulis dengan sebutan Bappeda Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga teknis pemerintah dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 3 menjelaskan tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang perekonomian, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang penyusunan program, *monitoring* dan evaluasi pembangunan, bidang riset dan pengembangan, dan bidang inovasi dan teknologi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah serta tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga, Bappeda Provinsi Jawa

Tengah menghasilkan jenis arsip, yaitu arsip perencanaan pembangunan, keuangan, dan kepegawaian sehingga arsip-arsip yang tercipta akan mengalami penambahan volume.

Bappeda Provinsi Jawa Tengah kini, tercatat hanya memiliki satu arsiparis yang bekerja di bidang pengelolaan arsip dan dokumen terletak di ruang tata usaha kesekretariatan dan mendekati masa purna bakhti dini. Adapun untuk menjalankan tata pengelolaan arsip, arsiparis mengerjakan tugasnya seorang diri dan kadang pula dibantu oleh anak-anak magang dengan jangka waktu tidak menentu. Permasalahan akan muncul ketika arsiparis mendekati masa purna bakhti dini sehingga akan terjadi kekosongan kedudukan dalam tata pengelolaan arsip. Beberapa permasalahan yang akan terjadi yaitu penumpukkan berkas arsip yang berserakan, ketidaksesuain pengolahan informasi yang terdapat di dalam arsip, dan ketidakseragaman dalam penataan berkas arsip serta tidak adanya peningkatan aktivitas dalam pengelolaan arsip dari tahap penciptaan hingga penyusutan, termasuk juga dalam hal pelayanan yang baik kepada pengguna arsip.

Guna menanggulangi kemungkinan hilangnya aset pengetahuan khususnya bidang ilmu tata pengelolaan arsip di Bappeda Provinsi Jawa Tengah, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai upaya-upaya terkait pelestarian pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan mencoba melakukan penelitian dengan judul, “Pelestarian Pengetahuan Arsiparis di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kegiatan dokumentasi dalam melestarikan pengetahuan arsiparis di Bappeda Provinsi Jawa Tengah?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menerapkan kegiatan dokumentasi dalam melestarikan pengetahuan arsiparis di Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis yaitu dapat menambah khazanah penelitian di bidang ilmu kearsipan, khususnya berhubungan dengan pelestarian pengetahuan penting pegawai dalam suatu organisasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan kajian yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan kegiatan dokumentasi dalam melestarikan pengetahuan pegawai agar tidak menimbulkan hilangnya pengetahuan ilmu kearsipan dalam organisasi.

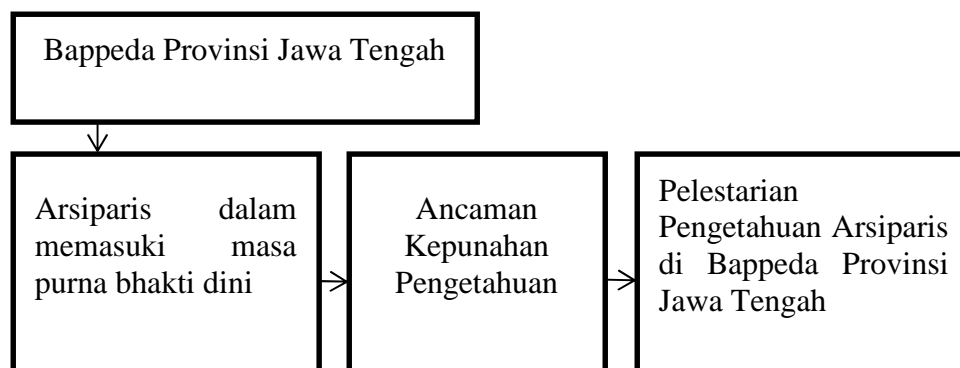
1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Pemuda 127-133 Semarang. Penelitian ini telah dilakukan selama bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli 2019.

1.6 Kerangka Pikir

Penelitian ini menerapkan pelestarian pengetahuan arsiparis di Bappeda Provinsi Jawa Tengah, dengan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



(Sumber: diolah peneliti, 2019)

Bappeda Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga teknis pemerintah yang bergerak dalam tugas pokok membantu gubernur untuk penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Lembaga ini memiliki sarana penyimpanan aset-aset pengetahuan dari lembaga yang dinaunginya ketika mengajukan sebuah perencanaan pembangunan daerah. Salah satunya aset pengetahuan pengelolaan arsip dikelola oleh seorang arsiparis yang sedang dalam memasuki masa purna bhakti dini. Sedangkan disisi lain, arsiparis tersebut merupakan satu-satunya arsiparis yang ada di Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Jika arsiparis tersebut tidak melakukan transfer pengetahuan ke anggota lainnya, maka pengetahuan tersebut akan terancam punah dan terjadi kekosongan kedudukan di bidang pengelolaan arsip dan dokumen. Hal ini juga akan berpengaruh pada ketidaksesuaian jalannya kinerja di Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam tata pengelolaan arsip. Untuk itu, arsiparis perlu melakukan upaya pelestarian pengetahuan dengan cara mentransfer pengetahuan kepada anggota lainnya. Kegiatan pelestarian pengetahuan merupakan sebuah bentuk usaha untuk melestarikan dan mempertahankan pengetahuan dan keterampilan khususnya di bidang tata pengelolaan arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan.

1.7 Batasan Istilah

Batasan istilah digunakan agar tidak terjadi salah pengertian. Beberapa istilah yang digunakan yaitu:

1. Arsiparis

Arsiparis adalah pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab dan bertugas dalam melaksanakan kegiatan kearsipan. Arsiparis yang dibahas lebih dalam adalah arsiparis yang mengelola kegiatan arsip yang ada di Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

2. Aset Pengetahuan

Aset pengetahuan adalah bagian dari aset tidak terwujud organisasi yang berkaitan dengan *input* dan *output* dari proses penciptaan pengetahuan. Aset pengetahuan yang dibahas lebih dalam adalah aset pengetahuan yang dimiliki arsiparis berupa pengetahuan, gagasan, informasi, dan keahlian di bidang tata pengelolaan arsip dan dokumen.